

# Al-Amru

## Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam

Research Article

### Etika Komunikasi Dakwah Digital Berbasis Hadis: Studi Kepustakaan Tentang Prinsip dan Urgensinya di Era Modern

Riki Janwir Hidayat<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; [250104210044@student.uin-malang.ac.id](mailto:250104210044@student.uin-malang.ac.id)
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; [nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Amru: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 15, 2025

Revised : November 20, 2025

Accepted : December 09, 2025

Available online : January 19, 2026

**How to Cite:** Riki Janwir Hidayat, & Nasrulloh, N. (2025). Ethics of Hadith-Based Digital Islamic Communication: A Literature Study of Its Principles and Urgency in the Modern Era. *Al-Amru: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 84–98. <https://doi.org/10.61166/al-amru.v1i2.10>

#### Ethics of Hadith-Based Digital Islamic Communication: A Literature Study of Its Principles and Urgency in the Modern Era

**Abstract.** Departing from the increasing dynamics of religious communication in the digital space which is often characterized by information distortion, polarization, and abuse of religious authority, this study aims to formulate an ethical framework for digital da'wah based on hadith by utilizing the analysis of the principles of communication ethics according to Johannesen. The study uses a library research method through the search for normative hadiths related to speech, information delivery, and the moral responsibility of communicators, which are then analyzed qualitatively through a

content approach and contextualized with Johannesen's principles of communication ethics, such as truthfulness, respect, harm-avoidance, responsibility, empathy, justice, and ethical freedom. The results of the study show that the hadiths on the obligation to speak the truth, the prohibition on spreading unverified information, the recommendation to speak well or remain silent, warnings against abuse of authority, as well as the principles of non-polarization and maintaining social harmony provide a strong normative basis for formulating digital da'wah ethics that are relevant to the challenges of modern communication ecology. The integration of hadith and Johannesen's theory emphasizes that communication ethics must avoid provocative rhetoric, antagonistic framing, and sectarian narratives, and instead prioritize information verification, polite communication, transparency of da'wah intentions, audience protection from manipulation, moral responsibility for social impacts, and a commitment to maintaining social cohesion as a communal good. This study concludes that the integration of hadith values and modern communication ethics can provide authoritative, adaptive, and constructive digital da'wah guidelines for Islamic preachers and content creators.

**Keywords:** Ethics Of Preaching, Digital, Hadith, Communication Ethics.

**Abstrak.** Berangkat dari meningkatnya dinamika komunikasi keagamaan di ruang digital kerap diwarnai distorsi informasi, polarisasi, dan penyalahgunaan otoritas keagamaan, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka etika dakwah digital berbasis hadis dengan memanfaatkan analisis prinsip-prinsip etika komunikasi menurut Johannesen. Penelitian menggunakan metode library research melalui penelusuran hadis-hadis normatif terkait ucapan, penyampaian informasi, dan tanggung jawab moral komunikator, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan isi serta dikontekstualisasikan dengan prinsip etika komunikasi Johannesen, seperti truthfulness, respect, harm-avoidance, responsibility, empathy, justice, dan ethical freedom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang kewajiban berkata benar, larangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, anjuran berkata baik atau diam, peringatan terhadap penyalahgunaan otoritas, serta prinsip non-polarisasi dan perawatan harmoni sosial memberikan dasar normatif yang kuat untuk merumuskan etika dakwah digital yang relevan dengan tantangan ekologi komunikasi modern. Integrasi hadis dan teori Johannesen menegaskan bahwa etika komunikasi harus menghindari retorika provokatif, framing antagonistik, serta narasi sektarian, dan sebaliknya mengedepankan verifikasi informasi, komunikasi santun, transparansi niat dakwah, perlindungan audiens dari manipulasi, tanggung jawab moral atas dampak sosial, serta komitmen menjaga kohesi sosial sebagai communal good. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai hadis dan etika komunikasi modern mampu menghadirkan pedoman dakwah digital yang otoritatif, adaptif, dan konstruktif bagi para dai dan kreator konten keislaman.

**Kata kunci:** Etika Dakwah, Digital, Hadis, Etika Komunikasi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan dan dakwah. Transformasi ruang komunikasi dari medium konvensional menuju platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai aplikasi pesan instan telah menciptakan lanskap baru bagi penyebaran pesan-pesan keagamaan. Digitalisasi dakwah memungkinkan pesan agama menjangkau audiens yang lebih luas, lintas geografis, dan lintas generasi. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola komunikasi dai kepada mad'u, namun juga memengaruhi cara masyarakat menerima, memahami, serta menginternalisasi nilai-

nilai keagamaan. Dalam konteks ini, dakwah tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik masjid, majelis taklim, atau forum keagamaan formal, tetapi telah berpindah ke ruang maya yang dinamis dan sangat kompetitif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi dakwah tidak hanya menawarkan peluang, tetapi juga memunculkan problem etis yang cukup serius. Sukayat menemukan bahwa banyak dai digital mengabaikan prinsip etika komunikasi sehingga konten dakwah di media sosial kerap didominasi oleh provokasi, sensasi, dan informasi tanpa verifikasi (Sukayat, 2023). Temuan serupa dikemukakan oleh Yusuf dan Muh Satra yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dai menyebabkan maraknya penyebaran misinformasi dan kesalahan tafsir keagamaan di platform seperti YouTube dan TikTok (Satra, n.d.). Selain itu, penelitian Ulyan menegaskan bahwa otoritas keagamaan di ruang digital semakin kabur akibat munculnya “ustaz instan” yang memproduksi konten agama secara serampangan untuk kepentingan popularitas (Ulyan, 2023).

Pesatnya kemajuan teknologi digital tidak jarang melahirkan problem baru dalam ranah dakwah. Salah satu isu aktual adalah degradasi etika dakwah akibat ketidaksiapan sebagian dai dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Banyak pendakwah digital yang mengedepankan sensasi, *clickbait*, provokasi, atau menampilkan perilaku yang tidak mencerminkan adab seorang juru dakwah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena dapat menggeser esensi dakwah sebagai proses penyampaian nilai-nilai Islam yang mengedepankan prinsip prinsip hikmah, kelembutan, amanah ilmiah, dan kejujuran.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas dinamika dakwah digital, namun belum banyak yang mengkaji digitalisasi dakwah secara sistematis dari perspektif hadis. Penelitian Ririn et al. menyoroti rendahnya kesadaran etis dalam dakwah media sosial, namun tanpa elaborasi hadis sebagai landasan normatif (Ririn Gusti et al., 2025). Kajian Syamsul Bahri dan Qomarudin menekankan pentingnya literasi digital bagi dai, tetapi tidak menghubungkan literasi tersebut dengan prinsip hadis (Syamsul Bahri & Komarudin Sassi, 2024). Studi Faridhatun Nikmah fokus pada tantangan sosiologis dakwah digital seperti misinformasi dan sensasionalitas, namun tidak menautkannya dengan sumber-sumber etika Islam (Nikmah, 2020). Temuan Halimatus Sakdiah et al. mengusulkan pendekatan komunikasi profetik, tetapi belum secara khusus menelaah hadis yang relevan dengan etika dakwah digital (Sakdiah et al., 2025).

Penelitian ini mengisi kekosongan studi research gap mengenai bagaimana hadis dapat dijadikan landasan moral dalam merumuskan etika dakwah digital yang komprehensif, meskipun Rasulullah ﷺ merupakan teladan utama dalam komunikasi dan dakwah, serta hadis berfungsi sebagai pedoman utama perilaku tutur dan penyampaian kebenaran. Pembaharuan penelitian terletak pada dua aspek utama: pertama, penempatan hadis sebagai fondasi normatif dalam merumuskan etika dakwah digital, sesuatu yang belum dikaji secara sistematis oleh penelitian sebelumnya; kedua, integrasi prinsip-prinsip hadis dengan Johannesen's Communication Ethics Theory yang menekankan tanggung jawab moral komunikator, kesantunan, kejujuran, penghargaan terhadap martabat audiens, dan

kesadaran terhadap dampak sosial komunikasi. Sintesis kedua kerangka etika ini menghadirkan paradigma baru dalam memahami etika dakwah digital (Johannesen, Valde, & Whedbee, 2008).

Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka etika dakwah digital berbasis hadis dengan menggunakan analisis prinsip-prinsip etika komunikasi menurut Johannesen yang diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik mengenai etika dakwah, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi para dai, konten kreator dakwah, dan lembaga keagamaan dalam memproduksi konten digital yang lebih bertanggung jawab. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan standar etika dakwah digital yang dapat meminimalkan misinformasi, mengurangi konten provokatif yang merusak otoritas keilmuan, serta memperkuat kembali fungsi dakwah sebagai sarana penyampaian nilai-nilai Islam yang santun, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara teoretis, integrasi hadis dan teori etika komunikasi juga membuka peluang pengembangan model etika dakwah digital yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan era teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *library research* yang berfokus pada analisis konsep digitalisasi dakwah dalam perspektif hadis. Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur tanpa melibatkan observasi maupun wawancara, sebagaimana karakter penelitian kepustakaan. Sumber data primer terdiri atas kitab-kitab hadis kanonik dan literatur hadis tematik, sedangkan data sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah terkait etika komunikasi dan dakwah digital (Zed (2014)). Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan tahapan identifikasi, seleksi dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi dan otoritasnya, melalui berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan jurnal Sinta.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Literatur diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hadis tentang komunikasi dan isu dakwah digital, kemudian disajikan dalam tema-tema analitis seperti etika komunikasi Islam, amanah informasi, dan larangan penyebaran hoaks (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan silang konseptual sesuai prinsip kredibilitas dan konfirmasi (Lincoln & Guba 1985). Dengan desain metodologis ini, penelitian menghasilkan pemetaan konseptual yang sistematis mengenai landasan etis dakwah digital berbasis hadis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Etika informasi dan komunikasi merupakan fondasi fundamental bagi praktik dakwah digital yang bertanggung jawab. Dalam ekosistem media sosial yang sarat dengan percepatan arus data, bias algoritma, disinformasi, serta kompetisi produksi konten keagamaan, kebutuhan terhadap kerangka etik menjadi semakin mendesak. Meskipun dakwah digital merupakan fenomena kontemporer, Islam telah

meletakkan prinsip-prinsip normatif etika komunikasi jauh sebelum hadirnya teknologi modern, khususnya melalui hadis Nabi ﷺ. Hadis menawarkan kerangka nilai yang mencakup validitas informasi, tanggung jawab moral, adab retorika, hingga pemeliharaan kohesi sosial keseluruhannya sangat relevan dengan tantangan komunikasi digital (Mukhammad Alfani, 2024).

Perpindahan dakwah ke ruang virtual tidak hanya memperluas akses dakwah, tetapi juga menimbulkan risiko baru: penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, distorsi makna, polarisasi wacana Islam, serta komodifikasi simbol-simbol agama (Hidayat et al., 2024). Dalam konteks ini, hadis Nabi ﷺ berfungsi sebagai *guiding principles* yang dapat diterjemahkan secara metodologis menjadi standar profesional komunikasi. Nilai-nilai profetik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *communication ethics* yang dikembangkan Johannesen, terutama terkait *truthfulness, respect, harm-avoidance, responsibility, empathy, justice, dan ethical freedom*. Dengan demikian, etika dakwah berbasis hadis tidak hanya mengatur perilaku personal seorang dai, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme menjaga kualitas informasi keagamaan, etika komunikasi publik, dan stabilitas sosial dalam ruang digital yang rentan manipulasi dan konflik (Firman Maulidna et al., 2025).

Setiap prinsip etika komunikasi yang dibahas Johannesen memiliki padanan langsung dalam khazanah hadis. Prinsip *truthfulness* misalnya, sejalan dengan kewajiban tabayyun dan akurasi informasi. *Respect* dan *dialogical ethics* tampak dalam tuntunan untuk berbicara dengan hikmah dan kelembutan. *Harm-avoidance* tercermin dalam prinsip tidak memicu fitnah dan tidak menimbulkan mudarat sosial. *Responsibility* berkaitan dengan amanah ilmiah dan akuntabilitas moral komunikator. *Empathy* berkelindan dengan larangan berkata kasar dan perintah untuk memahami kondisi penerima pesan. *Justice* tampak dalam larangan menimbulkan ketidakadilan atau polarisasi. Sementara *freedom with ethical boundaries* sejalan dengan prinsip Islam bahwa kebebasan berbicara harus dibatasi masalah dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (Johannesen, 1988).

Melalui integrasi antara hadis Nabi ﷺ dan teori etika komunikasi Johannesen, penelitian ini mengelaborasi tujuh pilar etika dakwah digital: (1) Prinsip *Truthfulness* dan *Tanggung Jawab Epistemik*, (2) Prinsip *Respect* dan *Kearifan Retorika*, (3) Prinsip *Empati, Kesantunan, dan Pengendalian Diri*, (4) Prinsip *Tanggung Jawab Moral dan Nonviolence*, (5) Prinsip *Avoidance of Harm dan Kemaslahatan Publik*, serta (6) Prinsip *Justice dan Pemeliharaan Kohesi Sosial*, Keenam prinsip ini membentuk kerangka komprehensif yang tidak hanya berakar pada nilai profetik, tetapi juga kompatibel dengan teori komunikasi modern, sehingga mampu menjawab problematika dakwah digital secara ilmiah,

### **Prinsip Truthfulness dan Tanggung Jawab Epistemik**

Dalam prinsip ini membahas mengenai verifikasi dan keakuratan informasi (*taḥqīq al-ma'lūmāt*) Hadis Nabi ﷺ: « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » (HR. Muslim) merupakan landasan etika yang menegaskan kewajiban verifikasi sebelum menyampaikan informasi. Secara lafaz, kata *yakdhiba* dipahami ulama bukan sekadar dusta yang disengaja, tetapi keadaan ketika seseorang “menjadi pendusta” karena

membiasakan diri menyampaikan setiap kabar tanpa seleksi. Para ulama seperti An-Nawawī menekankan bahwa hadis ini merupakan prinsip dasar *tabayyun*, yakni kehati-hatian epistemik agar seorang Muslim tidak menjadi sumber distorsi sosial. Hadis ini mengingatkan bahwa akar penyebaran informasi salah seringkali bukan niat buruk, tetapi kelalaian dalam menyeleksi dan memverifikasi kabar (Al-Nawawi, n.d.).

Dalam konteks dakwah digital, pesan normatif hadis ini menjadi semakin relevan. Media sosial mempercepat arus informasi melalui viralitas, potongan ceramah yang terlepas dari konteks, kutipan hadis tanpa sumber, serta konten bernuansa emosional yang dibagikan tanpa pengecekan (Yuseva et al., 2025). Budaya serba cepat ini menciptakan kecenderungan untuk membagikan informasi tanpa proses klarifikasi, sehingga memperbesar risiko kesalahpahaman, polarisasi, dan kerentanan terhadap penyebaran konten yang reduktif atau bias. Situasi ini menjadikan prinsip kehati-hatian, verifikasi, dan pengendalian diri sebagaimana diajarkan hadis sebagai etika mendasar yang harus diinternalisasi dalam aktivitas dakwah digital.

Jika dianalisis melalui Teori Etika Komunikasi Johannesen, hadis tersebut sepenuhnya selaras dengan tiga prinsip inti yang ia tekankan dalam praktik komunikasi etis. Pertama, prinsip kejujuran (*truthfulness*), bahwa komunikator berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Larangan Nabi ﷺ untuk tidak menceritakan semua yang didengar mencerminkan tuntutan agar komunikator menjaga integritas pesan dan menghindari praktik komunikasi yang dapat memunculkan penipuan, kekeliruan, atau ambiguitas. Kedua, prinsip tanggung jawab moral (*communication responsibility*), yaitu kewajiban mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pesan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam menyampaikan informasi dapat memicu fitnah dan kerusakan sosial, sehingga seorang dai atau kreator konten memikul tanggung jawab moral untuk memastikan pesan yang ia sebarkan tidak menimbulkan dampak negatif. Ketiga, prinsip penghindaran mudarat (*avoidance of harm*), yang menuntut komunikator berhati-hati terhadap potensi kerugian psikologis, sosial, dan moral dari pesan yang ia sampaikan. Dalam ruang digital, potongan ceramah tanpa konteks, klaim agama yang berlebihan, atau pernyataan yang memancing ketakutan dapat menciptakan kerusakan sosial yang luas, sehingga kontrol diri sebagaimana diajarkan hadis menjadi instrumen etis yang sangat penting.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa hadis “كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا” bukan hanya mengandung peringatan teologis, tetapi juga menawarkan kerangka etika komunikasi yang sejalan dengan teori Johannesen. Hadis tersebut menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagai prasyarat komunikasi etis, khususnya dalam dakwah digital yang sarat risiko kesalahan informasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hadis dapat difungsikan sebagai pedoman normatif bagi dai dan kreator konten agar mampu menjaga kualitas pesan, meminimalisasi mudarat sosial, dan menghadirkan dakwah digital yang lebih etis, kredibel, dan bertanggung jawab.

## Prinsip Respect dan Kearifan Retorika

Pembahasan prinsip respect dan kearifan retorika yang didalamnya tentang Hikmah kebijaksanaan, ketepatan membaca situasi, serta kemampuan menyeimbangkan antara kebenaran substansi dan metode penyampaian. Konsep ini mendapatkan legitimasi kuat dalam hadis Nabi ﷺ “Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu memiliki daya pengaruh seperti sihir” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa cara penyampaian pesan memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi, respon, dan penerimaan audiens. Dengan demikian, dakwah tidak cukup hanya benar secara substansi, tetapi harus disampaikan dengan retorika, timing, dan sensitivitas sosial yang tepat (Rifah & Sa'idaturrohman, 2025).

Prinsip hikmah semakin diperjelas melalui sabda Nabi ﷺ yang lain, «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، «وَوَيْبِرُوا وَلَا تُعَيْبِرُوا» “Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari; mudahkanlah dan jangan mempersulit” (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa pendekatan dakwah harus disesuaikan dengan kesiapan psikologis dan tingkat literasi audiens. Dalam konteks digital, relevansi prinsip tersebut semakin kuat karena media sosial menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka dan massal, di mana audiens berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Kekeliruan kecil dalam pilihan diksi, nada, atau framing dapat menimbulkan backlash, salah tafsir, atau polarisasi dalam waktu yang sangat cepat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa absennya hikmah sering menjadi sumber konflik digital. Penggunaan bahasa yang emosional, kritik konfrontatif, atau penyampaian dalil tanpa konteks yang memadai kerap melahirkan kesalahpahaman dan perdebatan publik yang tidak produktif. Dalam kajian komunikasi digital, hal ini sejalan dengan konsep digital civility, yang menekankan pentingnya kesantunan, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam interaksi daring. Komunikasi yang kasar dapat memicu efek psikologis seperti backfire effect, yaitu penolakan audiens bukan karena isi pesan, tetapi karena cara penyampaiannya yang dianggap menyerang atau merendahkan (Zuraidah, 2013).

Sejalan dengan Etika Komunikatif Johannesen, prinsip hikmah beririsan dengan sejumlah kategori penting: audience adaptation, yaitu penyesuaian pesan dengan kondisi audiens; tolerance for disagreement, yaitu kemampuan mengelola perbedaan tanpa retorika yang memecah belah; serta nonviolence, yaitu larangan atas gaya komunikasi agresif maupun provokatif yang dapat memunculkan kekerasan simbolik. Selain itu, hikmah juga selaras dengan communicative responsibility tanggung jawab komunikator untuk menjaga kejelasan, menghindari ambiguitas yang berbahaya, serta menciptakan suasana komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian, hikmah dalam perspektif hadis dan teori etika modern menjadi pedoman strategis bagi da'i dan konten kreator dalam merancang komunikasi digital yang ramah, sensitif, dan efektif. Prinsip ini memastikan bahwa dakwah tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga menghidirkannya dengan cara yang menumbuhkan kedamaian, menghindari polarisasi, dan tetap sesuai dengan tuntunan Nabawi.

### Prinsip Empati, Kesantunan, dan Pengendalian Diri,

Kontrol diri Kesantunan berbahasa merupakan aspek fundamental dalam etika dakwah. *hifz al-lisan wa al-rifq* ditegaskan dalam berbagai hadis yang menekankan kelembutan, ketenangan, dan pengendalian diri dalam berbicara. Salah satu hadis yang paling relevan adalah sabda Nabi ﷺ: «وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ» “Perkataan yang baik adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Para ulama memahami *al-kalimah al-tayyibah* bukan hanya sebagai ucapan yang lembut, tetapi juga sebagai tutur yang menyenangkan, membangun, serta bebas dari unsur menyakiti hati. Hadis ini tidak hanya menunjukkan nilai spiritual dari komunikasi yang santun, tetapi juga menegaskan bahwa tutur kata memiliki dimensi sosial yang dapat menumbuhkan kebaikan dalam hubungan antarindividu (Alber et al., 2025).

Kesantunan ini sangat relevan dalam konteks dakwah digital, di mana komunikasi berlangsung cepat, impulsif, dan sering kali dipicu oleh emosi. Banyak konflik digital, perdebatan antar kelompok, dan perang komentar antara pendukung dai tertentu bermula dari hilangnya kendali diri ketika merespons isu yang sensitif. Media sosial menyediakan ruang yang memfasilitasi ekspresi spontan tanpa refleksi, sehingga memunculkan gaya komunikasi yang kasar, merendahkan, atau sarkastik. Sikap reaktif ini bertentangan dengan spirit hadis yang menekankan bahwa kata-kata baik adalah bentuk ibadah sekaligus instrumen penyebar kedamaian. Dalam dakwah digital, ucapan seorang dai bukan hanya representasi dirinya, tetapi juga citra dari ajaran yang ia bawa, sehingga pengendalian diri menjadi tuntutan moral yang tidak dapat diabaikan (Rachmawati, 2017).

Jika dianalisis dengan Teori Etika Komunikasi Johannesen, prinsip kesantunan berbahasa memiliki korespondensi kuat dengan kategori *courtesy*, *respect*, dan *nonviolence*. Pertama, prinsip *courtesy* menuntut komunikator menghargai audiens melalui pemilihan bahasa yang sopan dan penuh empati. Hadis tentang *kalimah tayyibah* memberikan legitimasi religius bahwa kesopanan bukan sekadar norma sosial, tetapi kewajiban moral yang nilainya setara dengan sedekah. Kedua, prinsip *respect* dalam kerangka Johannesen mengharuskan komunikator memperlakukan audiens sebagai individu bermartabat. Kesantunan berbahasa mencerminkan penghormatan terhadap emosi, harga diri, dan keragaman sensitivitas audiens. Ketiga, prinsip *nonviolence* menegaskan bahwa komunikasi tidak boleh menjadi sarana agresi simbolik. Dalam ruang digital, agresi verbal seperti hinaan, sindiran kasar, atau pesan bernada menghakimi memiliki dampak destruktif yang dapat menyebar lebih cepat daripada agresi fisik (Anjani, 2024).

Selain itu, prinsip kesantunan berbahasa selaras dengan gagasan Johannesen tentang *communicative responsibility*, yaitu tanggung jawab komunikator untuk menciptakan situasi komunikasi yang kondusif dan menghindari provokasi. Dai digital memiliki kewajiban etis untuk menghindari gaya tutur yang memicu polarisasi, seperti generalisasi kelompok, vonis agama yang ekstrem, atau penggunaan diksi yang merendahkan pihak lain. Pengendalian diri dalam berbicara merupakan mekanisme utama untuk mencegah konflik, terutama dalam isu-isu sensitif seperti akidah, mazhab, dan perbedaan fikih. Dengan demikian, kesantunan

bukan sekadar soal estetika bahasa, tetapi strategi etis yang menjamin keberlangsungan dialog yang damai dan produktif.

Dalam perspektif dakwah digital, pengendalian diri juga menjadi filter utama untuk mencegah kesalahan komunikasi yang tidak disengaja. Banyak dai yang terseret kontroversi bukan karena substansi ajarannya, tetapi karena cara penyampaian yang keras atau menyinggung kelompok tertentu. Hadis *al-kalimah al-tayyibah* memberi pedoman bahwa komunikasi yang baik tidak hanya menghindari kekerasan verbal, tetapi juga aktif mempromosikan kedamaian. Dengan memadukan prinsip hadis ini dan kerangka Johannesen, dakwah digital dapat diarahkan menuju komunikasi yang berempati, beradab, dan menebarkan kebaikan. Kesantunan berbahasa pada akhirnya menjadi jembatan antara kebenaran pesan dan keterterimaan publik, sehingga dakwah lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan tuntunan Nabawi.

### Prinsip Tanggung Jawab Moral dan Nonviolence

Pada prinsip Tanggung Jawab Moral dan *Nonviolence* yang mengandung nilai *amanah* 'ilmiyah, hadis-hadis Nabi ﷺ banyak menekankan larangan menggunakan lisan untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, menimbulkan mudarat, atau memicu bentuk kekerasan verbal maupun sosial. Hadis-hadis Nabi ﷺ banyak menekankan larangan menggunakan lisan untuk menyakiti, merendahkan, atau menimbulkan permusuhan. Di antara teks yang paling relevan adalah sabda beliau: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبُذِيِّ» “Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, atau berkata kasar.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini memberikan batas moral yang tegas bahwa karakter seorang Muslim ditentukan oleh kemampuan menjaga lisannya dari ekspresi verbal yang bermuatan kebencian. Para ulama seperti Ibn Battal dan al-Mubarakfuri menegaskan bahwa larangan ini tidak sekadar menjauhi makian, tetapi mencakup seluruh bentuk agresi verbal yang melemahkan kehormatan orang lain. Dengan demikian, hadis ini menjadikan etika tutur sebagai indikator integritas spiritual seorang mukmin (Ibn Baṭṭāl, 2003).

Dalam konteks dakwah digital, larangan ujaran kebencian menjadi semakin penting karena media sosial menyediakan ruang bagi anonimitas, eskalasi emosi, dan kompetisi naratif yang sering kali memicu bahasa polemis. Banyak kasus memperlihatkan bagaimana sebagian dai atau pengikutnya terlibat dalam ujaran bernada menghina, mengkafirkan, atau merendahkan kelompok lain demi mempertahankan otoritas atau membalas kritik. Gaya komunikasi seperti ini memperkuat tribalitas digital, menurunkan wibawa dakwah, dan kontraproduktif terhadap misi Islam yang rahmatan lil-'alamin. Hadis tersebut menuntut bahwa seorang dai harus menjadi teladan dalam menahan diri dari segala bentuk agresi verbal, bahkan ketika berhadapan dengan provokasi. Larangan makian bukan hanya etika interaksi sosial, tetapi fondasi moral dalam mengelola perbedaan dan konflik di ruang digital (Lois et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan Teori Etika Komunikasi Johannesen, hadis di atas selaras dengan prinsip *nonviolence*, yang menuntut bahwa komunikasi tidak boleh menjadi alat untuk menyakiti psikologis atau merendahkan martabat orang lain. Johannesen

menekankan bahwa kekerasan verbal memiliki dampak destruktif yang tidak kalah berbahaya dibanding kekerasan fisik karena dapat menghancurkan relasi sosial dan menormalisasi kekasaran dalam ruang publik. Hadis Nabi yang melarang kata-kata keji dan kasar merupakan landasan etik yang secara langsung sejalan dengan prinsip ini. Selain itu, prinsip *respect* dalam teori Johannesen menegaskan kewajiban menghormati keberadaan dan kehormatan audiens. Ketika seorang dai menggunakan bahasa yang menghina, ia secara otomatis melanggar prinsip penghormatan ini serta merusak legitimasi moral dakwahnya.

Prinsip *responsibility* dalam kerangka Johannesen juga sangat relevan, karena seorang komunikator memiliki tanggung jawab moral atas dampak ujarannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam dakwah digital, satu ucapan yang bernada kasar dapat direproduksi ribuan kali melalui fitur berbagi, komentar, atau stitching, sehingga dampaknya bisa meluas jauh melampaui konteks awal. Hadis yang melarang makian dan ujaran keji menegaskan bahwa penyebaran kekerasan verbal adalah bentuk kelalaian moral yang bertentangan dengan misi dakwah. Dengan demikian, seorang dai digital harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap tuturannya dan menghindari gaya komunikasi yang memprovokasi konflik.

Secara praktis, integrasi antara hadis dan teori Johannesen memberikan kerangka etika dakwah yang memprioritaskan perdamaian, penghormatan, dan pengendalian diri. Larangan ujaran kebencian bukan hanya menjaga kualitas wacana publik, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif. Dengan demikian, dakwah digital yang berpegang pada prinsip-prinsip ini akan jauh lebih efektif dalam merangkul audiens yang beragam, sekaligus menjaga citra Islam sebagai agama yang mengajarkan kelembutan, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

### Prinsip Avoidance of Harm dan Kemaslahatan Publik

Pembahasan prinsip avoidance of harm dan kemaslahatan publik ini menekankan *maslahat* dan orientasi perbaikan sosial menjadi topik utama. Dalam etika Islam, *maslahat* memiliki peran krusial, sebab sebuah tindakan dinilai layak apabila membawa kebaikan, mencegah kerusakan, serta memperkuat tatanan sosial. Konsep *maslahat* menempati posisi sentral dalam etika Islam, karena penilaian terhadap suatu tindakan sangat ditentukan oleh manfaat dan dampaknya bagi kehidupan sosial. Dalam konteks dakwah, prinsip *maslahat* menuntut bahwa setiap pesan yang disampaikan harus membawa kebaikan, ketenangan, dan perbaikan sosial, bukan memicu kecemasan, kebingungan, atau ketegangan. Hadis-hadis Nabi ﷺ memberikan landasan normatif yang kuat bagi prinsip ini. Di antara kaidah yang paling fundamental adalah sabda beliau: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” Hadis ini dipahami ulama sebagai pedoman universal yang melarang segala bentuk tindakan yang menghasilkan mudarat, termasuk tindakan komunikasi. Dengan demikian, praktik dakwah harus menghindari segala jenis narasi yang dapat menimbulkan kerusakan psikologis, sosial, atau epistemik pada audiens (Firdaus, n.d.).

Dalam konteks digital, prinsip maslahat memperoleh signifikansi baru karena ruang media sosial bekerja dengan logika viralitas yang tidak selalu selaras dengan nilai kebenaran, kesantunan, atau kedalaman ilmiah. Konten dakwah yang sensasional, mengancam, atau menakut-nakuti sering kali lebih cepat menyebar daripada konten yang edukatif dan bernuansa. Fenomena seperti “horor agama”, narasi kiamat tanpa validitas, atau retorika menakutkan yang ditujukan untuk memancing keterlibatan publik merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip maslahat. Ujaran semacam itu dapat menciptakan kepanikan kolektif, merusak kesehatan mental, dan melahirkan pemahaman agama yang reduktif. Oleh karena itu, konsep maslahat menuntut para dai digital untuk menimbang dampak sosial dari setiap pesan, bukan hanya aspek kesahihan dalil atau keindahan retorikanya.

Dalam perspektif Teori Etika Komunikasi Johannesen, prinsip maslahat berkorespondensi langsung dengan prinsip *responsibility*, yaitu tanggung jawab komunikator untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari ujarannya. Johannesen menegaskan bahwa komunikasi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan menyampaikan pesan, tetapi sebagai tindakan moral yang memiliki efek nyata terhadap dunia sosial. Seorang komunikator yang etis tidak hanya memikirkan apa yang ingin dikatakan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pesan itu akan diterima, dipahami, dan berdampak pada audiens. Dalam dakwah digital, pertimbangan ini menjadi semakin penting karena satu konten dapat menjangkau jutaan orang, melintasi batas budaya, usia, dan tingkat literasi agama. Hadis “*lā ǧarar wa lā ǧirār*” secara langsung mendukung prinsip etika Johannesen ini, karena sama-sama mengajarkan bahwa komunikasi harus diarahkan untuk mencegah bahaya dan memaksimalkan kemaslahatan sosial.

Prinsip maslahat juga berkaitan erat dengan prinsip *honesty* dalam kerangka Johannesen, karena kebenaran informasi adalah prasyarat utama bagi terwujudnya manfaat sosial. Konten agama yang disederhanakan secara berlebihan, dilepaskan dari konteks, atau dirancang untuk memicu ketakutan tidak memenuhi kriteria kejujuran dalam komunikasi. Kejujuran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga tidak menyembunyikan kompleksitas persoalan atau memanipulasi emosi audiens demi popularitas. Dengan demikian, prinsip *honesty* menuntut dai digital untuk memastikan bahwa setiap informasi agama yang disampaikan bersifat akurat, proporsional, dan tidak mengandung unsur manipulatif. Kejujuran seperti inilah yang akan menghasilkan maslahat jangka panjang, karena membangun kepercayaan dan stabilitas epistemik dalam masyarakat (Kusumo & Mariana, 2025).

Jika diintegrasikan secara utuh, hadis dan teori Johannesen memberikan kerangka metodologis yang harmonis bahwa dakwah tidak hanya harus benar secara substansi, tetapi juga etis dalam tujuan dan dampaknya. Prinsip maslahat memastikan bahwa dakwah digital diarahkan untuk menghasilkan ketenangan, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah polarisasi, sementara teori Johannesen memberikan perangkat etik untuk memastikan bahwa proses komunikasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran terhadap dampaknya. Dengan demikian, integrasi ini menjadikan dakwah digital bukan sekadar aktivitas

penyiaran pesan agama, tetapi praktik komunikasi etis yang berorientasi pada perbaikan sosial dan kemaslahatan publik.

### Non-Polarisasi dan Perawatan Harmoni Sosial

Hadis Nabi ﷺ «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» menjadi fondasi normatif terkuat dalam membangun etika komunikasi, terutama di ruang digital. Secara matan, struktur redaksinya menegaskan bahwa identitas moral seorang Muslim ditentukan oleh kemampuannya menjaga keselamatan orang lain. Frasa «مَنْ سَلِمَ» yang berasal dari akar kata salima menunjukkan makna damai, teduh, dan terbebas dari bahaya. Penyebutan “lisan” sebelum “tangan” menunjukkan penekanan bahwa bahaya verbal lebih destruktif daripada tindakan fisik, karena dampaknya lebih cepat menyebar dan sulit dihapus. Ulama seperti Ibn Hajar menegaskan bahwa makna “lisan” mencakup seluruh ekspresi yang berpotensi menyakiti, sehingga dalam konteks modern termasuk teks digital, komentar, caption, dan narasi visual. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya mengatur akhlak personal, tetapi menjadi pedoman moral bagi interaksi komunikatif dalam ekosistem digital yang luas dan sensitif (Nasution, 2025).

Dari sudut pandang ushul dan bahasa, penggunaan kata “tangan” dalam hadis dipahami sebagai majāz mursal yang mewakili seluruh tindakan manusia, termasuk aktivitas non-verbal. Penafsiran ini memungkinkan penerapan makna hadis pada fenomena ekspresi digital: unggahan, editing gambar, penyebaran meme, hingga bentuk interaksi visual lainnya. Para ulama kontemporer mengaitkan makna ini dengan prinsip *ḥifẓ al-wiḥdah al-ijtimā'iyah*, yaitu kewajiban menjaga keutuhan sosial. Dalam realitas media sosial, di mana komunikasi berlangsung cepat dan tidak jarang impulsif, perluasan makna “lisan” dan “tangan” menjadi sangat relevan untuk mengatur bagaimana seorang Muslim berperilaku secara digital. Maka, hadis ini berfungsi bukan hanya sebagai aturan etis individual, tetapi sebagai kerangka normatif yang menjaga harmoni sosial dalam komunikasi global yang rentan konflik.

Ketika hadis tersebut dianalisis melalui perspektif Etika Komunikasi Johannesen, relevansinya tampak semakin kuat. Johannesen menekankan bahwa komunikasi etis harus berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia, kejujuran, kepekaan emosional, dan tanggung jawab atas dampak sosial sebuah pesan. Prinsip ini sejalan dengan pesan hadis, bahwa kesalehan seseorang tercermin dari minimnya mudarat yang muncul dari ekspresi komunikatifnya. Di ruang digital, algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten kontroversial yang memicu emosi negatif, sehingga retorika tajam atau konfrontatif sering kali lebih cepat viral. Fenomena ini mendorong terciptanya emosionalisasi pesan, di mana interaksi publik digerakkan oleh konflik, bukan dialog. Dalam konteks ini, teori Johannesen bertindak sebagai filter etis untuk memastikan setiap pesan dakwah diuji dari sisi kejujuran, empati, tanggung jawab moral, dan dampaknya terhadap stabilitas sosial.

Dengan mengintegrasikan prinsip hadis dan teori Johannesen, konsep non-polarisasi dalam dakwah digital menjadi kewajiban moral yang bersifat aktif, bukan sekadar larangan untuk menghindari caci maki. Setiap bentuk dakwah yang menimbulkan fragmentasi—melalui penyederhanaan khilafiyah, pola “kami vs

mereka”, atau labeling keagamaan yang memecah—secara substansial bertentangan dengan pesan hadis tersebut. Nabi ﷺ mencontohkan dakwah yang merangkul dan memulihkan, bukan yang memperlebar jarak sosial. Dalam kerangka Johannesen, komunikasi etis diarahkan kepada communal good, yakni menjaga martabat dan harmoni antarkomunitas. Karena itu, dakwah digital menuntut pemilihan bahasa yang inklusif, penyajian perbedaan secara proporsional, serta kepekaan terhadap keragaman mazhab agar tidak melahirkan antagonisme. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sekaligus sebagai pedoman moral dan strategi komunikasi agar dakwah tetap menghadirkan rahmat, bukan konflik, di ruang digital yang sarat potensi polarisasi.

## KESIMPULAN

Hasil kajian terhadap etika dakwah digital menunjukkan bahwa seluruh rumusan masalah penelitian dapat dijawab secara komprehensif melalui integrasi prinsip-prinsip hadis dengan *Johannesen’s Communication Ethics Theory*. Pertama, analisis hadis menegaskan bahwa etika verifikasi, kehati-hatian berbicara, kesantunan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan pengendalian diri merupakan fondasi normatif yang kokoh dalam komunikasi Islam. Kedua, kajian tekstual-kontekstual membuktikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam ruang digital yang rentan misinformasi, distorsi makna, *context collapse*, serta budaya viralitas. Ketiga, ketika dipadukan dengan perspektif Johannesen, seluruh nilai hadis tersebut membentuk kerangka etika yang konsisten, terutama pada aspek kejujuran, tanggung jawab komunikatif, kesadaran terhadap dampak sosial ujaran, serta penghormatan terhadap audiens sebagai entitas bermartabat.

Kajian ini juga memperjelas bahwa prinsip *non-polarisasi* dan *perawatan harmoni sosial* merupakan bagian integral dari etika dakwah digital. Hadis tentang keselamatan lisan dan tangan menuntut pencegahan aktif terhadap produksi ujaran yang memecah, mengeras, atau memperburuk ketegangan sosial. Ketika dibaca melalui teori Johannesen, dakwah digital harus diarahkan pada *communal good*, yakni menguatkan kohesi, merawat keragaman, dan menghindari retorika yang menciptakan antagonisme seperti penyederhanaan khilafiyah, labelisasi sektarian, atau pembingkaiian “kami vs mereka”. Dengan demikian, dakwah digital dipahami bukan hanya sebagai penyampaian pesan religius, tetapi sebagai praktik komunikatif yang menuntut integritas epistemik, sensitivitas moral, dan komitmen pada harmoni sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil merumuskan model etika dakwah digital berbasis hadis–Johannesen yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian: (1) menjelaskan prinsip-prinsip etika komunikasi dalam hadis, (2) menganalisis relevansinya terhadap dinamika dan tantangan dakwah digital, serta (3) menghasilkan kerangka etika dakwah digital yang aplikatif sebagai pedoman teoretis maupun praktis. Kerangka ini diharapkan menjadi kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu dakwah modern sekaligus pijakan normatif dalam memproduksi konten dakwah yang kredibel, bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan serta keutuhan sosial umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulyan, M. (2023). Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(3), 100–113. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.591>
- Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Alber, M. J. A., Yanto, M. N. F., & Abdillah, M. (2025). Etika Komunikasi Dalam Islam: Membangun Hubungan Harmonis Antar Sesama. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 399. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/>
- Anjani, V. A. (2024). *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia : Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital* Pendahuluan membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan. 4(1), 1–28.
- Firdaus, M. M. (n.d.). *Teori Aksi al- Kindī, al - Ghazālī, dan al - Māturīdī serta Konsep Din sebagai Landasan Tatanan Sosial yang Berkelanjutan*.
- Firman Maulidna, Khairatul Ulfi, Annisa Mulia, Ahmad Zuhri Ramadhan, & Muhammad Saleh. (2025). Etika Dakwah di Media Digital : Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 315–336. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.1005>
- Hidayat, H. N., Wicaksana, M. R. C., Irdana, M. Z., & Djohar, F. (2024). Dakwah di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Dunia Maya. *Informatics.Uii*, 5(1), 1. <https://informatics.uui.ac.id/2024/05/02/dakwah-di-era-digital-tantangan-dan-peluang-di-dunia-maya/>
- Ibn Baṭṭāl, 'Alī ibn Khalaf. (2003). *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Maktabah al-Rushd.
- Johannesen, R. L. (1988). What should we teach about formal codes of communication ethics? *Journal of Mass Media Ethics*, 3(1), 59–64. <https://doi.org/10.1080/08900528809358310>
- Kusumo, Y. W., & Mariana, M. (2025). Manajemen Komunikasi Islam : Prinsip, Konsep, dan Relevansi di Era Modern. *Journal Of Islamic Management*, 5(1), 29–54.
- Lois, K., Ulya, H., Al-karim, M. F. A., Kurniawan, B., & Siswanto, A. H. (2025). Dakwah Digital Multimazhab: Analisis Strategi Komunikasi Islam Moderat Di Era Post-Truth. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 682–687. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis>
- Mukhammad Alfani, L. A. (2024). Kontekstualisasi Hadis Dalam Era Digital: Retorika Dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah Di Media Sosial. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Keindonesiaan*, 18(2).
- Nasution, L. A. (2025). Etika Komunikasi Netizen Di Media Instagram Pada Akun @Khoir 11 (Ditinjau Dalam Pandangan Islam). In *Press STAI Darul Hikmah Bangkalan: Vol. Vol. 1 (Issue 1)*. <https://jurnal.staidhi.com/index.php/pressstaidhi/article/view/352>
- Nikmah, F. (2020). 10.18592/msr.v2i1.3666. *Muṣarrah: Jurnal Kajian Islam*

- Kontemporer*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3666>
- Rachmawati, F. (2017). Rethinking Uswah Hasanah: Etika Dakwah dalam Bingkai Hiperrealitas. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 307. <https://doi.org/10.21580/jid.v35i2.1612>
- Rifah, S., & Sa'idaturrohmah, N. (2025). Alam tara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. *Alamtara : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9(1), 16–24.
- Ririn Gusti, Arsyadani Mishbahuddin, & Citra Dwi Palenti. (2025). Peran Dakwah Dalam Membangun Moralitas Generalasi Milinial. *Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(1), 1–15.
- Sakdiah, H., Rahmah, M. N., Adawiah, R., & Aslamiah, R. (2025). Prophetic Communication in Digital Preaching: Building a Critical and Wise Society in Using Social Media/Komunikasi Profetik dalam Dakwah Digital: Membangun Masyarakat yang Kritis dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 13(1 SE-Articles), 13–24. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/view/16161>
- Satra, M. Y. H. M. (n.d.). Kajian Tafsir Al-Quran Di Era Digital: Literasi Dan Pengaruh Teknologi. *Literasilogi*, 12, 226–239.
- Sukayat, T. (2023). *Jurnal Ilmu Dakwah Implementing da 'wah ethics on social media*. 105.
- Syamsul Bahri, & Komarudin Sassi. (2024). Implementasi Prinsip Tabayyun Dalam Menangkal Hoaks Dan Disinformasi (Analisis Al-Hujurat Ayat 6 Sebagai Framework Literasi Digital Berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Integratif Jurnal Pendidikan*, 5(3), 115–122.
- Yuseva, P., Adisel, A., & Sari, W. A. (2025). Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Pembelajaran Menyimak Informasi Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di SMPN 18 Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(3), 1238–1247. <https://jpion.org/index.php/jpi/article/view/555/361>
- Zuraidah, R. (2013). *Pola Komunikasi Persuasif Dalam Fanspage*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2105/1/Rofila%0AZuraidah.pdf>